

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Suparman ¹, Dedi Kusnadi ², Dwi Haryono ³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dilihat dari faktor Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana, faktor sosialisasi penyaluran dana dan faktor koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat Desa. Dapat dikatakan demikian karena pada kenyataannya ADD tersebut lebih diprioritaskan atau direalisasikan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya diprioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan satu dengan lainnya dan dapat tercipta akselerasi pembangunan yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya : faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Alokasi Dana Desa.

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di Kabupaten Kayong Utara kebijakan mengenai ADD dilaksanakan pada tahun 2013. Dasar hukumnya yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan adalah Peraturan Daerah Kab. Kayong Utara Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kab. Kayong Utara Nomor : 5 Tahun 2010 tentang ADD. Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ADD di Kabupaten Kayong Utara, maka ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Kayong Utara Nomor 87/BMPDPKB-B/III/2013 tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013, yang sekaligus merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap beberapa hal yang bersifat teknis dan lebih rinci dalam pelaksanaan ADD.

Berdasarkan surat edaran Bupati Kayong Utara tentang pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pemerintah Desa tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengatur dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa dengan dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Tujuan ADD adalah untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala besar dengan penetapan besarnya ADD untuk seluruh desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan sumber penerimaan kabupaten.

Penetapan ADD berdasarkan Peraturan Daerah dan Surat Edaran Bupati tersebut, sehubungan Kabupaten Kayong Utara memiliki tantangan yang spesifik di dalam mengejar pertumbuhan daerah dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat. Tantangan yang utama adalah kesenjangan diberbagai bidang, baik infrastruktur maupun sosial. Kesenjangan yang terjadi pada Kabupaten Kayong Utara disebabkan oleh luasnya wilayah dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan wilayah Kecamatan Kabupaten Kayong Utara saat ini. Luasnya wilayah menyebabkan sulitnya pembagian dan pembangunan. Demikian juga kebijakan serta prioritas pembangunan yang diarahkan kepada daerah-daerah yang memiliki nilai strategis ditinjau dari pandangan ekonomi dan politik menyebabkan daerah-daerah pedalaman dan kepulauan yang tidak atau kurang memiliki nilai ekonomis dan politis yang tinggi menjadi terabaikan.

Jika melihat program ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara tidak ada unsur kepentingan politik, program ADD dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, merupakan salah satu usaha pemerintah daerah ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan serta pelaksanaan gotong royong. Karena Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, perlu dinilai dan diukur untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifannya, yaitu apakah program telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan pengamatan terdahulu, menunjukkan bahwa pelaksanaan program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, meliputi:

1. Masih relatif rendahnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Kurang tertibnya administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, sehingga kurangnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPDKB) sebagai lembaga teknis pengelola ADD dengan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD belum mempunyai jejaring kolaborasi (*net working*) dengan dinas/instansi perangkat otonom terkait dalam menyusun agenda kerja untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan ADD kepada Perangkat Desa terutama dalam upaya mengoptimalkan pertanggung jawaban dana ADD.

Indikasi adanya permasalahan dalam pelaksanaan program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara ini menjadikan penulis menjadi tertarik melakukan penelitian terhadap proses implementasi program ini dengan judul “Implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”. Penelitian ini menjadi perlu dilakukan. karena program ini akan terus berlanjut pada anggaran berikutnya, sehingga hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan pada pelaksanaan program berikutnya ataupun perencanaan untuk program sejenis pada masa-masa mendatang, terutama bagi Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dilihat dari faktor Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana, faktor sosialisasi penyaluran dana dan faktor koordinasi.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagaimana proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Program

Menurut Winarno (2002:74), bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi antara lain: (1) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (2) Karakteristik-karakteristik badan pelaksana; (3) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi implementasi; (4) Kecenderungan para pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan. Implementasi yang kurang berhasil seringkali kurang memperhatikan atau membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga, sehingga pejabat-pejabat tinggi (Pemkab) kurang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa para pelaksana kurang dapat bertindak secara konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan. Kontek implementasi kebijakan Pemerintah, menuntut adanya perubahan atau inovasi

terhadap peran pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, sehingga kiranya dapat memberikan intruksi, terhadap pelayanan masyarakat, mengatur menjadi memberdayakan dan bekerja semata-mata untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi.

Implementasi program merupakan satu tahap penting dalam proses program, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberi hasil. Menurut teori Edward III (dalam Tachjan. 2006:25) ada empat hal yang mempengaruhi terlaksananya implementasi program antara lain: 1) Komunikasi, 2) Disposisi /sikap pelaksana, 3) Sumber daya, 4) Struktur Birokrasi. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengopersikan sebuah program, dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya, sebagaimana dinyatakan Jones (2006:46) yaitu : Organisasi, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program; Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutindari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan ujuan program.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Winarno tersebut, menunjukkan bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku birokrasi pelaksanaannya. Perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa, 2006:19), merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, dengan membagi 6 (enam) indikator yang semuanya ini harus dicermati oleh seorang evaluator, yaitu: (1) kompetensi dan jumlah staf; (2) rentang dan derajat pengendalian; (3) dukungan politik yang dimiliki; (4) kekuatan Organisasi; (5) derajat Keterbukaan dan kebebasan komunikasi; (6) Keterkaitan dengan pembuat kebijakan. Keenam indikator tersebut, maka indikator terakhir menunjuk pada akses organisasi dalam mempengaruhi kebijakan. Kesemua indikator tersebut membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan akhirnya dapat menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya.

2. Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:789) diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo (2003:89) program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek. Sementara itu menurut Jones (2006: 25) program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumberdaya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumberdaya yang tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu: (1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur; (2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran; (3) Program dapat dihitung secara analisis *cost benefit*. Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya. (Kunarjo, 2003:9).

Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari berbagai macam, menurut Munir, (2002:11, bahwa program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi

juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam :

- a. Ruang lingkup. Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat dan kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpecah pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu.
- b. Ukuran (*Size*). Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang.
- c. Durasi. Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya.
- d. Kejelasan dan spesifikasi program input. Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan.
- e. Kompleksitas tujuan. Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur.
- f. Kebaruan program. Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada.

Model kesesuaian ini akan dapat berjalan dan berhasil seperti yang diharapkan, apabila di dalam proses pelaksanaan terhadap program Menurut Kuncoro (2007: 214) memenuhi tiga kriteria, yaitu :

1. Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan oleh program ini, dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi.
2. Pengalokasian ADD Kesesuaian antara keputusan-keputusan organisasi pelaksana program dengan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk meminta pelayanan program, ini mengacu pada realisasi pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja, kegiatan gotong royong, belanja perlengkapan.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan berkesinambungan, dinamis, secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan.

Program ADD merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagai implementasi program pemerintah yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor: 5 Tahun 2010, tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Program ADD ini sebagai suatu program tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan program ADD, sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis program ADD, yaitu :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Program ADD merupakan paket kegiatan yang bertujuan membantu pemerintah desa, yang mempunyai prinsip pengelolaan sebagai berikut, yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan (*Determinan*)

Pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan atau program dibidang ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang tujuan semuanya adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, keadilan, pemerataan, peningkatan pendapatan, kepedulian terhadap orang miskin dan berbagai tujuan yang layak untuk dipuji. Namun sayangnya pelaksanaan suatu kebijakan atau program tersebut selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dunn (2000:11) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program ditentukan oleh *policy content* (isi kebijakan) dan *context* (konteks implementasi), yaitu:

- 1. Isi kebijakan atau program mencakup :
 - a. Kepentingan yang dipengaruhi,
 - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan,
 - d. Kehendak pembuat kebijakan,
 - e. Siapa pelaksana program dan Sumber daya.
- 2. Sedangkan konteks implementasi mencakup:
 - Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
 - Karakteristik lembaga dan penguasa dan
 - Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Implementasi kebijakan atau program bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari implementasi kebijakan atau program merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Menurut Agustino (2006:18) ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program yakni (1) Sumber Daya Manusia, (2) Sosialisasi Penyaluran Dana, (3) Pelaksanaan koordinasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, yaitu di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang secara teknis administrasi menangani pelaksanaan program ADD. Subjek penelitian atau sebagai sumber data

yaitu individu dan organisasi pelaksana program, yang dapat memberikan informasi yang akurat, yaitu terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPDKB) Kabupaten Kayong Utara.
- b. Camat Sukadana
- c. Kelompok Sasaran yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa
- d. Pemuka masyarakat sebanyak 3 orang.

Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik bertujuan atau *purposive* dan teknik pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Alat pengumpul data yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat berupa foto copy, arsip-arsip dan dokumen. Analisis data dilakukan setelah data selesai dikumpulkan, data-data yang muncul dalam penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian kata. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta membuat kesimpulan dari hasil penelitian.

D. HASIL PENELITIAN

1. Proses Implementasi

a. Pengorganisasian program Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan Pelaksanaan ADD dengan menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan ADD tahun 2013. Informan penelitian menyatakan bahwa, dalam rangka persiapan pelaksanaan ADD, Kabupaten Kayong Utara melaksanakan berbagai persiapan baik dari kesiapan Sumber Daya Manusia maupun ketentuan peraturan yang mengatur pelaksanaannya, diantaranya :

- a. Membentuk Tim Pembina ADD yang berkedudukan di Kabupaten dan Tim Pengendali Kecamatan yang ada di kecamatan-kecamatan
- b. Memberikan pelatihan kepada tenaga teknis dari Tim Pengendali Kecamatan dengan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan untuk 2 (dua) orang staf Kecamatan.
- c. Memberikan Pelatihan kepada Tenaga Teknis Aparat Desa dengan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Mengadakan studi banding dengan beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat, diantaranya Kabupaten Sambas serta keluar provinsi Kalimantan Barat, yaitu ke Provinsi Jawa Barat tepatnya Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan ADD di daerah masing-masing.
- e. Melakukan konsultasi intensif dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Kayong Utara belum memiliki dasar hukum yang baru menjadi acuan dalam pelaksanaan ADD. Pada Tahun 2013 dalam melaksanakan ADD di Kabupaten Kayong Utara masih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang ADD. Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ADD di Kabupaten Kayong Utara, maka ditetapkan Berdasarkan Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 87/BMPDPKB-B/III/2013 tentang Pemberian Bantuan Alokasi

Dana Desa (ADD) perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD di Kabupaten Kayong Utara. Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap beberapa hal yang bersifat teknis dan lebih rinci dalam pelaksanaan ADD.

Pada tahap Musrenbang desa, semua unsur yang ada di tiap dusun berkumpul di Kantor Desa beserta unsur di tingkat desa. Berbagai aspirasi yang diperoleh di tingkat dusun sebagai hasil dari tiap-tiap dusun disampaikan dan dibahas. Kemudian setiap aspirasi akan dimusyawarahkan untuk dipilih berbagai alternatif aspirasi atau permasalahan yang dianggap lebih penting dan bermanfaat. Dalam pelaksanaan ADD diawali dengan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait desa, yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan Pelaksanaan ADD dengan menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan ADD Tahun 2013. Perencanaannya dibahas dalam forum musrenbangdes. Camat Sukadana, menyatakan bahwa proses musrenbang Desa di Kecamatan Sukadana adalah sebagai berikut :

- a. Pra Musyawarah
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa

Adapun penentuan penggunaan dana berdasarkan prioritas desa ditetapkan sesuai dengan skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes yang secara legal dan formal kemudian dituangkan ke dalam masing-masing Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2013 dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). ADD yang diawali kegiatan penyusunan dan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait di desa yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah. Hasil wawancara dengan Camat Sukadana, memberikan keterangan bahwa penentuan ADD ditetapkan sesuai dengan skala prioritas desa yang merupakan hasil Musrenbangdes yang kemudian dituangkan ke dalam APBDDes merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ADD untuk Operasional Pemerintah Desa dan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Guna menunjang efektivitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat. Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kayong Utara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Bupati sebagai Pengarah I, Wakil Bupati, sebagai Pengarah II, Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab, Asisten I Setda, sebagai Ketua, Kepala DPPKAD sebagai Wakil Ketua, Kepala BPMPDPKB sebagai Sekretaris selaku koordinator asistensi, Kepala BAPPEDA sebagai Anggota, Kepala Inspektur Daerah sebagai Anggota, Kepala Bidang Pendapatan, sebagai Anggota, Kasi Anggaran DPPKAD sebagai Anggota, Kepala Bagian Hukum Setda sebagai Anggota, Kasi Keuangan dan Aset Desa sebagai Anggota, Sekretariat Pelaksana lainnya. Sedangkan Tim Pembina Tingkat Kabupaten memiliki tugas, antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya
- b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.

- c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD
- d. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten.
- f. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Tim Pengendali Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Camat, Sebagai Ketua, Sekretaris Kecamatan, sebagai Sekretaris, Kasi Pemerintahan, sebagai Anggota, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai Anggota, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, sebagai Anggota, Staff Kecamatan 1 (satu) orang, sebagai Anggota Sekretariat. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Secara rinci tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan.
- b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih.
- c. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.;
- d. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
- e. Bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memfasilitasi Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- f. Melakukan pemeriksaan pekerjaan (Verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan Anggaran ADD di desa.
- g. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD.
- h. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan sekretaris Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan staf yang secara khusus menangani ADD sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan masing-masing. Dengan adanya unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan ADD yang ada di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

b. Interpretasi Program Alokasi Dana Desa

Pemahaman program ADD bisa mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung dari sisi dan latar belakang realitas yang dihadapi oleh sekumpulan maupun individu yang menyangkut kemampuan dalam hal ekonomi, politik dan tentu saja

mampu mandiri dalam tatanan kehidupan sosial. Pemahaman program ADD masyarakat di pedesaan dan di perkotaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik. Namun beberapa konsep kemandirian yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk dibangkitkan kembali, tujuan dari kemandirian ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Prakteknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri. Diketahui bahwa, pada dasarnya ADD merupakan alat untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat desa agar dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri di wilayahnya. Dengan adanya ADD masyarakat desa dapat belajar menangani kegiatan pembangunan secara swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk mandiri membangun desanya. Untuk itu sudah seharusnya seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh warga secara luas sehingga dana yang diturunkan akan mempunyai nilai guna dan bermanfaat bagi warga. Desa-desanya di Kecamatan Sukadana merasa lebih mandiri dalam membangun desanya karena ADD memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada desa untuk mengatur pengelolaan dana maupun rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam ADD ini, sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi oleh desa. Dengan begitu Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Sukadana dituntut untuk mengatur keuangannya secara efektif dan efisien sehingga dalam ADD ini proses pemberdayaan masyarakat akan lebih optimal.

Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukadana sudah berusaha untuk menyusun anggaran desa sesuai dengan prosedur yang berlaku, artinya untuk prinsip partisipatif ini, pemerintah desa mengajak Badan Permusyawaratan Desa untuk bermusyawarah bersama. Sebelum diadakan musyawarah bersama di tingkat desa, untuk penentuan kebutuhan, prioritas dan harapan warga setiap desa di Kecamatan Sukadana, mengadakan musyawarah di tingkat RT kemudian dilanjutkan pada musyawarah tingkat dusun. Pada prinsipnya prosedur tersebut telah memperhatikan aspirasi Masyarakat Desa. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang disusun melalui musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, menunjukkan berjalannya fungsi dua komponen penting di desa. Selain itu warga desa juga ikut terlibat dalam pembangunan desa, menjadi salah satu bukti tingkat partisipasi masyarakat desa yang tinggi. Masyarakat mau diajak bergotong-royong membangun desa, kunci yang digunakan adalah bagaimana para Aparatur Pemerintah Desa bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan para tokoh masyarakat untuk mendekati warga, merangkul warga desa untuk diajak berpikir bersama dan melakukan aktivitas bersama-sama berbuat banyak pada desa yang menjadi tempat tinggal mereka bersama.

Dilihat dari partisipasi sebagai kekuatan yang ikut melahirkan kebijakan ADD maka dalam proses pengelolaannya partisipasi tetap diindahkan bahkan pihak kabupaten sebagai pemberi dana tersebut menekankan partisipasi sebagai elemen yang penting untuk menjamin terjadinya transparansi dan akuntabilitas serta dengan anggaran dari desa yang disusun dari dana swadaya dan gotong-royong warga guna mewujudkan proyek-proyek pembangunan dan pembangunan masyarakat. Tuntutan mewujudkan transparansi itu bukan menjadi ancaman bagi para penyelenggara pemerintahan desa karena kunci dari terlaksananya pembangunan terletak dari

partisipasi, meskipun partisipasi masih kuat merujuk pada kesediaan warga untuk menanggung beban biaya proyek yang diusulkan.

Berlangsungnya pembangunan melalui dana ADD di Kabupaten Kayong Utara, khususnya di Desa-desanya Kecamatan Sukadana telah dirasakan baik oleh pemerintah kabupaten, Desa maupun masyarakatnya. Dari segi kepentingan pemerintah kabupaten, dengan adanya ADD, maka pemerintah kabupaten tidak lagi ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan skala desa karena masing-masing desa bersama warganya sudah mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pihak desa sekarang menjadi lebih tahu dan terlatih untuk menyusun prioritas kebutuhan pembangunannya. Munculnya kebutuhan pengembangan Kapasitas Desa (Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-Lembaga Desa lainnya) untuk secara partisipatif dan sistematis merumuskan tantangan-tantangan dalam pembangunan desa. Secara rinci pengalaman di Kecamatan Sukadana, manfaat adanya ADD bagi desa adalah tidak terlalu banyak urusan, melalui transfer dana ke desa berupa ADD maka desa tidak selalu melibatkan diri dalam penyelesaian permasalahan desa karena setiap desa bersama warganya sudah mampu menyelesaikannya sendiri, kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala kabupaten yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat bagi pembangunan jangka panjang.

c. Aplikasi Program Alokasi Dana Desa

1. Proses Pencairan Alokasi Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2013 mengalokasikan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- untuk 43 Desa dan dibagi sebesar 60 % (Enam Puluh Per Seratus) secara merata keseluruh desa yaitu sebesar Rp.6.000.000.000 Selajutnya yang 40 % (Empat Puluh Per Seratus) atau sebesar Rp.4.000.000.000 di bagi secara proporsional kepada desa dengan memperhatikan indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan, luas wilayah, jumlah penduduk dan unit komunitas (jumlah RT). Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, oleh karena itu tidak lagi dibagi per dusun. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ADD untuk Operasional Pemerintahan Desa dan ADD untuk kemandirian masyarakat. Pengalokasian bantuan ADD oleh pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Sukadana telah menyusun dan menetapkan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2013
- b. Dokumen Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013.
- c. Berita Acara Musyawarah Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2013.
- d. Setelah seluruh dokumen-dokumen yang dimaksud disusun dan ditetapkan, kemudian dokumen-dokumen ini disampaikan kepada Camat selaku Pembina atau Penanggungjawab Tim Pengendali ADD tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Kayong Utara c.q Kepala BPMPDPKB Kabupaten Kayong Utara lewat Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pengendali Kecamatan. Bagian PMD Kantor BPMPDPKB Kabupaten Kayong Utara akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kayong Utara. Kepala DPPKAD Kabupaten Kayong Utara akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank Kalbar cabang Sukadana atas nama Pemerintah Desa.

- e. Dana Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang dinamakan ADD untuk desa di Kecamatan Sukadana Tahap I sebesar 60 % (Enam Puluh Per Seratus) telah ditransfer oleh DPPKAD Kabupaten Kayong Utara kerekening Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Sukadana pada Bank Kalbar cabang Sukadana. Pencairan ADD dilakukan oleh bendahara Desa pada Bank Kalbar cabang Sukadana dengan membawa SK Kepala Desa tentang Penunjukkan sebagai Bendahara Desa. Surat kuasa dari Kepala Desa untuk pencairan dana ADD dan Kartu Tanda Penduduk. Pada saat akan mencairkan ADD, slip pengambilan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pencairan dana ADD dilakukan setelah adanya pemberitahuan tertulis dari Tim Kabupaten.
- f. Setelah ADD diterima oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Sukadana Tahap I dapat dicairkan di Bank, maka pada Agustus sampai dengan September 2013 Pemerintah desa di Kecamatan Sukadana melaksanakan kegiatan Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap I.
- g. Pelaksanaan kegiatan ADD oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukadana Tahap I selesai dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan menjadwalkan agenda Musyawarah Desa tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap I. Pelaksanaan Musyawarah Desa ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Tim Pengendali Kecamatan. Rekapitulasi hasil musyawarah Desa tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukadana Tahap I dilaporkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati Kayong Utara melalui Tim Pembina Kecamatan, yaitu Camat.
- h. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Sukadana Tahap I oleh Tim Pengendali Kecamatan dan kemudian diterbitkan Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Kayong Utara melalui Tim Pembina Kabupaten dapat mencairkan ADD Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukadana Tahap II sebesar 40 % (Empat Puluh Per Seratus).
- i. ADD yang di terima oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukadana dapat dicairkan di Bank, maka pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2013 dilaksanakan kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.
- j. Pelaksanaan kegiatan ADD oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukadana telah selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan selanjutnya melaksanakan Musyawarah Desa tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap II. Musyawarah desa ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Tim Pengendali Kecamatan. Kemudian Kepala Desa melaporkan rekapitulasi hasil musyawarah Desa tentang Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap II kepada Bupati Kayong Utara melalui Tim Pembina Kecamatan, yaitu Camat.

Pelaksanaan program ADD yang diawali kegiatan penyusunan dan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait di desa, yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalamnya adalah persiapan pelaksanaan ADD, menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan ADD Tahun 2013 bagi desa-desa di Kecamatan Sukadana.

2. Pengalokasian Alokasi Dana Desa ke Pos-Pos yang Sudah Direncanakan

Kebijakan program ADD diberikan secara langsung kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukadana oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan Penggunaan sebesar 30 % (Tiga Puluh Per Seratus) untuk Alokasi Biaya Operasional dan 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus) untuk alokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan penggunaan keuangan desa yang bersumber dari ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penentuan kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari ADD merupakan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat di setiap desa yang ada di Kecamatan Sukadana.

Bantuan pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan yang dilokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Sukadana akan dan diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja operasional Pemerintah Desa meliputi pengadaan ATK, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kepala Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, perjalanan dinas dalam daerah, dan konsumsi rapat. Sedangkan dalam hal pembangunan desa meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti program LPM dan program pokok PKK, Kepemudaan serta pembangunan sarana dan prasarana umum yaitu pembangunan infrastruktur desa.

Alokasi dana operasional sebesar 30 % (Tiga Puluh Per Seratus) dari ADD yang diterima, digunakan untuk :

- a. Bantuan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa
- b. Bantuan Operasional Kantor Pemerintahan Desa dan bantuan Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
- c. Bantuan Operasional LPM, RT dan Lembaga lainnya.

ADD sebesar 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa setiap desa di Kecamatan Sukadana yang telah disusun dan dimusyawarahkan dengan memprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat. Penggunaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Partisipatif adalah perencanaan penggunaan ADD disusun melalui mekanisme Perencanaan Partisipatif serta adanya keterlibatan masyarakat desa secara luas dalam setiap tahapan pelaksanaan ADD. Transparansi adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka semua informasi yang berkaitan dengan perencanaan, penggunaan dan pelaporan. ADD Akuntabilitas adalah bahwa setiap dana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya kebutuhan pembangunan fisik dan non fisik harus berimbang untuk mencapai maksud dan tujuan ADD. Penekanan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan pemerintahan juga harus diperhatikan, tidak hanya semata pembangunan fisik desa saja. Seiring dengan perkembangan jaman,

kualitas sumber daya manusia pun harus meningkat dan ADD telah mengarah ke peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni dengan memberdayakan masyarakat. Karena pemberdayaan masyarakat menjadi agenda penting dalam kebijakan ADD, karena selama ini pembangunan yang ada difokuskan pada pembangunan fisik, seperti pengerasan jalan, membangun jembatan, membangun gedung Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa program ADD ini merupakan salah satu bentuk adanya pembangunan desa seperti pembangunan pasar tradisional ini, karena pembangunan pasar tradisional sangat menguntungkan bagi masyarakat desa Simpang Tiga. Selain dapat menambah kas dan pendapatan desa, pembangunan fisik dan non fisik ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan ADD di Kecamatan Sukadana. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu hingga mencapai Rp 10 miliar/kabupaten, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, pemerintah desa memang masih belum terbiasa dengan adanya program pemberdayaan masyarakat. Semua dana memang biasanya untuk pembangunan fisik saja namun dana alokasi tahun 2013 ini untuk pembangunan fisik lebih kepada pembangunan pasar desa. Kemudian ADD yang tersedia digunakan untuk kegiatan Kepemudaan, kegiatan PKK dan kegiatan- kegiatan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan program ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat desa di Kayong Utara untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dari Rencana Kegiatan Anggaran Desa di Kecamatan Sukadana, penggunaan dana ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Sukadana digunakan sesuai dengan pengalokasian ke pos-pos yang sudah direncanakan yaitu untuk kegiatan PKK, kepemudaan dan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya yang yang direncanakan. Perencanaan penggunaan Dana ADD untuk pembangunan Desa pada satu tahun ke depan telah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa biasa disingkat RKPDes. RKPDes merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa biasa disingkat Musrenbangdes yang dilaksanakan pada awal bulan tahun bersangkutan.

3. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Tim penggerak PKK Kecamatan Sukadana merupakan kader pembinaan untuk PKK pada 10 desa di Kecamatan Sukadana. Kegiatan-kegiatan PKK pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penggunaan

dana ADD, kegiatan PKK ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan kesekretariatan dan belanja masing-masing Pokja. Masing-masing Tim Penggerak PKK dari 10 desa di Kecamatan Sukadana setiap bulannya juga melaksanakan kegiatan Posyandu dan kesehatan, yang kegiatannya berupa kegiatan penyuluhan kesehatan, Posyandu, dan Perbaikan Gizi Anak dan Balita yang bekerjasama dengan Puskesmas di Kecamatan Sukadana. Dalam hal ini terlihat dari semangat dan kemauan Tim Penggerak PKK Desa dan Kader PKK di tiap- tiap desa benar-benar memanfaatkan dana yang berasal dari ADD.

4. Pembinaan Kepemudaan.

Peran aktif masyarakat desa di Kecamatan Sukadana dalam pemberdayaan masyarakat yang berbentuk pembinaan kepemudaan sesuai dengan bidang-bidangnya, antara lain :

- a. Terbentuknya kelompok keagamaan di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sukadana.
- b. Terbentuknya kelompok olah raga dari 10 desa di Kecamatan Sukadana terdiri dari kesebelasan sepak bola, perkumpulan bola voli dan kegiatan olah raga lainnya.
- c. Terbentuknya kelompok kesenian dan kebudayaan dari masing-masing desa.

Kemudian Pemuka masyarakat desa Riam Berasap Jaya di Kecamatan Sukadana, memberikan keterangan bahwa pada pelaksanaan program ADD Tahun 2013, pembinaan anak dan remaja (Kepemudaan) difokuskan pada kegiatan dan pembinaan olah raga. Pos anggaran terlihat bahwa pembinaan olah raga digunakan untuk belanja kostum sepak bola dan bola voli. Selain itu untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan olah raga, maka diperlukan sarana dan fasilitas penunjang berupa bola dan perlengkapan lainnya. Dalam kesempatan alokasi dana ini, maka di belanjakan bola untuk sepak bola, bola dan net untuk voli. Dengan adanya pembinaan olah raga dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat maupun bagi desa sendiri. Selain untuk kesehatan, kegiatan olah raga ini juga dapat memupuk rasa kebersamaan dan kerjasama antar anggota masyarakat. Diharapkan pula pembinaan olah raga ini ke depannya dapat membawa masyarakat desa di Kecamatan Sukadana ke berbagai turnamen dan perlombaan yang diadakan dan diselenggarakan di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan bahkan Nasional.

5. Belanja Komputer

Penambahan sarana komputer ini dimaksudkan sebagai unit kerja yang secara fungsional menangani pelaksanaan ADD perangkat desa dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan dan pertanggung jawaban ADD dan administrasi desa lainnya. Dari uraian-uraian program-program tersebut maka Pemerintah Desa di Kecamatan Sukadana telah melakukan perencanaan yang melibatkan partisipasi warga desa selain koordinasi antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dari perencanaan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan pengontrolan sehingga program desa terpantau dan dapat dievaluasi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

a. Sumber Daya Manusia (Personil) dan Sumber Daya Dana

Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatar belakangi oleh pendidikan dari aparatur

pemerintah desa yang ada ditingkat desa di Kecamatan Sukadana yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa di Kecamatan Sukadana menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa di Kecamatan Sukadana mengalami kesulitan. Hal ini juga berakibat pada pengoperasian komputer.

Diperoleh keterangan bahwa, masalah SDM yang dihadapi pemerintah Desa di Kecamatan Sukadana dalam mengalokasikan dana desa, mengalami kesulitan pada saat menyusun surat pertanggungjawaban untuk pencairan selanjutnya, karena sebagian dari aparat desa sebagian besar tidak memahami dalam mengoperasikan komputer sehingga lambat dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak tersimpan. Berdasarkan keterangan ini dapat ditelaah bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa di Kecamatan Sukadana adalah minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa. Hal ini merupakan suatu faktor internal yang datang dari dalam diri pemerintah desa di Kecamatan Sukadana dalam hal membuat laporan

b. Sosialisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa

Dari hasil wawancara dengan inform diperoleh keterangan bahwa, tidak seluruh kelompok sasaran/pemerintah desa yang mengikuti sosialisasi kebijakan program ADD. Sosialisasi kebijakan program memang dilakukan hanya satu kali. Waktu itu di undang untuk mengikuti sosialisasi. Untuk selanjutnya yang ikut sosialisasi agar dapat menyampaikan kepada aparatur desa lainnya. Selain itu kita juga mengadakan koordinasi dengan pihak kecamatan dan anggota DPRD agar menyampaikan program tersebut sesuai dengan wilayah yang diwakilinya. Jika dianalisis dari hasil pengamatan dan wawancara, maka kegiatan sosialisasi kebijakan program ADD yang dilakukan sudah cukup maksimal karena kegiatan sosialisasi tidak hanya berhenti sampai disitu saja dan masih dilanjutkan dengan kegiatan lainnya seperti pembinaan. Setelah dikonfirmasi dengan pemerintah desa selaku kelompok sasaran ADD mengatakan, bahwa pada umumnya mereka memperoleh informasi dari pihak kecamatan dan pegawai pemda serta aparatur desa lainnya.

Selanjutnya mengenai penyaluran dan pertanggungjawaban atau pelaporan dana ADD yang akan dilihat adalah proses penyaluran dana ADD tersebut dari Pemerintah daerah dan Bank Penyalur kepada pemerintah desa. Seperti telah diuraikan secara singkat pada bab sebelumnya, bahwa mekanisme penyaluran, pencairan dan pelaporan ADD berpedoman pada pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Selanjutnya diperoleh keterangan juga bahwa, pelaporan pertanggungjawaban dana ADD dirasakan cukup berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana setiap desa berusaha untuk secepat mungkin menyampaikan laporan pengelolaan dan penggunaan dana ADD. Tidak dipungkiri terdapat pemerintah desa yang nakal, artinya terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD sehingga pencairan dana tahap berikutnya juga terhambat. Namun ini telah kita antisipasi lebih jauh terhadap yang belum menyampaikan laporan tersebut. Upaya yang kita lakukan dengan cara menghubungi pemerintah desa dan membantu sebisa mungkin tentang tata cara pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian tidak banyak desa yang lambat dalam menyampaikan laporan ADD-nya. Dari keterangan ini dapat diasumsikan, bahwa prosedur pelaporan pertanggungjawaban ADD oleh pemerintah desa telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suatu hal yang

wajar suatu program mengalami hambatan/kendala yaitu keterlambatan penyampaian laporan ADD. Dari Pihak DPPKAD Kabupaten Kayong Utara dan BPMPDPKB telah mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang timbul sehingga tidak terdapat desa yang sama sekali tidak dapat menyampaikan laporan ADD.

c. Koordinasi

Hasil wawancara terhadap informan menyatakan bahwa, hambatan yang di hadapi dalam mengalokasikan dana yaitu kurangnya koordinasi dari Kecamatan, Kantor BPMPDPKB dan DPPKAD Kabupaten Kayong Utara masalah surat pertanggung jawaban (SPJ), sebenarnya aturan tentang pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) tersebut sudah jelas. Pelaksanaan koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan akan menghambat proses pelaksanaan program tersebut dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sehingga menyulitkan perangkat desa. Proses pelaksanaan program ADD ini, BPMPDPKB sebagai salah satu implementator kebijakan program ADD sekaligus tempat bertemunya oleh Tim Pembina dan Tim Pengendali ADD. Agar implementasi kebijakan berhasil harus ada kerjasama yang baik diantara Tim, seperti memverifikasi APBDes, dan membantu pemerintah desa dalam proses penetapan peraturan desa tentang APBDes dan yang penting adalah pembinaan dalam proses pengelolaan dana ADD tersebut agar tepat sasaran dan supaya tidak macet dalam pertanggung jawabannya. Sebelum pelaksanaan kebijakan program ADD ini dilaksanakan, secara intern perlu diadakan pertemuan untuk merencanakan kegiatan, sehingga pada saat pelaksanaan implementasinya setiap personil sudah mengetahui tugas dan fungsinya. Kemudian masing-masing personil juga sudah dibekali dengan surat keputusan (SK). Berdasarkan beberapa keterangan ini menunjukkan bahwa, setiap personil yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan program ADD telah memahami tujuan dari kebijakan program ADD. Hal ini tentunya didukung oleh kualitas sumber daya itu sendiri serta kemampuannya dalam menciptakan hubungan kerja antara personil yang terlibat. Kondisi ini tentunya akan mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menggambarkan bahwa, setiap personil memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap implementasi kebijakan/program. Hal ini sudah kewajiban karena selaku aparat setiap tugas yang diembankan harus didukung dan dilaksanakan. Diperoleh informasi memang ada anggota Tim yang tidak bisa hadir ataupun turun kelapangan pada saat jadwal yang ditentukan karena kesibukan tugas pokok masing-masing, seperti dari pihak DPPKAD, biasanya mereka punya jadwal sendiri seperti membuat pertanggungjawaban keuangan kabupaten, memverifikasi dan mendata SPJ tiap unit kerja dan juga tugas pokok lainnya. Jika dianalisis dari pendapat tersebut, diasumsikan bahwa kendatipun telah terjadi koordinasi yang baik diantara implementor kebijakan program ADD, namun bukan berarti bahwa pelaporan pertanggungjawaban ADD dapat dengan mudah disampaikan oleh Pemerintah Desa. Pertanggungjawaban ADD yang kurang lancar terjadi misalnya bukan hanya disebabkan kurang optimalnya koordinasi dalam pembinaan, tapi dapat pula disebabkan sikap dan perilaku aparatur pemerintah desa yang lalai terhadap tanggung jawabnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi program Dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara

belum dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat desa. Indikasinya antara lain:

- Pengorganisasian program ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sukadana kepada masyarakat desa belum terlaksana secara optimal. Karena belum berfungsinya Tim Pembina ADD yang berkedudukan di Kabupaten dan Tim Pengendali Kecamatan yang ada di kecamatan Sukadana. Hal tersebut terlihat dari rencana ADD yang lebih banyak dituangkan untuk belanja rutin daripada untuk belanja pembangunan, seperti operasional pemerintahan desa, operasional BPD, pengadaan pakaian dinas, belanja modal untuk sarana dan prasarana kantor desa serta tunjangan perangkat desa, BPD dan lembaga desa lainnya.
 - Interpretasi atau pemahaman masyarakat desa di Kecamatan Sukadana setelah adanya program Alokasi Dana Desa, terlihat relatif rendah. Hal tersebut disebabkan kurangnya pelatihan kepada tenaga teknis dari Tim Pengendali Kecamatan dengan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan kepada Tenaga Teknis Aparat Desa dengan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga proses pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional desa di Kecamatan Sukadana belum berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada.
 - Aplikasi pengalokasian Dana Desa di Kecamatan Sukadana dalam rangka pemberdayaan masyarakat belum mengarah kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat Desa. Karena pada kenyataannya ADD tersebut lebih diprioritaskan atau direalisasikan pada pembangunan fisiknya, adapun pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan dikarenakan Desa di Kecamatan Sukadana banyak sekali pembangunan fisik yang belum ada, sehingga masyarakat lebih besar menganggarkan untuk infratraktur. Jadi kesimpulannya untuk kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana, meliputi:
- a. Faktor Sumber Daya Manusia, yaitu belum mempunyai setiap aparatur desa mengimplementasikan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD secara penuh (*personal accountability*) sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam bentuk laporan, karena masih relatif rendahnya kemampuan dan keahlian personil terutama aparat desa dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana ADD.
 - b. Faktor sosialisasi penyaluran dana ADD yang masih terlihat belum optimal, karena masih banyak masyarakat desa yang belum memahami pemanfaatan program ADD tersebut, sehingga penggunaan ADD terbilang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Faktor koordinasi yang terlihat belum optimalnya dilakukan oleh BPMPDPKB sebagai lembaga teknis pengelola ADD dengan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dan belum mempunyai jaring kolaborasi (*net working*) dengan dinas/instansi perangkat otonom terkait dalam menyusun agenda kerja untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan ADD kepada Perangkat Desa di Kecamatan

Sukadana terutama dalam upaya mengoptimalkan pertanggungjawaban dana ADD.

2. Saran-Saran

- a. Mengatasi masalah pengorganisasian kebijakan program ADD, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara hendaknya membuat dasar hukum pengelolaan keuangan desa yang lengkap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di lapangan dan perangkat Kecamatan dapat menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- b. Mengatasi kurangnya pemahaman atau interpretasi aparat kecamatan ataupun aparat desa dalam mengimplementasikan program ADD, maka perlu adanya pelatihan kepada tenaga teknis dari Tim Pengendali Kecamatan dengan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa secara khusus kepada, sehingga dalam mengimplementasikan program ADD dapat berjalan lancar. Sehubungan tingkat pendidikan aparat desa di Kecamatan Sukadana relatif rendahnya, yang tentunya dapat mempengaruhi kemampuan dan keahlian personil terutama aparat desa dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana ADD.
- c. Meningkatkan Aplikasi pelaksanaan program, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara hendaknya perlu memperhatikan swadaya dan gotong royong masyarakat desa sehingga pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun berikutnya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta, Cetakan I.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar. 2002. *Penelitian Kebijakan*. Malaysia: Makalah disampaikan pada peretemuan peneliti Melayu Muda di Johor.
- Departemen Pendidikan RI. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kambun. 2003. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Suatu Teori)*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2005. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Koncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*. Edisi I. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kunarjo. 2003. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI – Press.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: BAPPEDA Propinsi NTB.
- Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suhendra. 2005. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2004. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI.

Stewart, Aileen Mitchell. 1998. *Empowering People*. Dalam terjemahan Hardjana, A.M. *Empowering People, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Wibawa, Samudra. 2006. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2002. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, UGM.

Dokumen Pemerintah:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*, Direktorat Jenderal Pemerintahan Masyarakat Desa Depdagri.

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluyarga Berencana (BPMPPDKB) Kabupaten Kayong Utara.

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010 *Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)*.

Surat Edaran Bupati Kayong Utara Nomor 87/BMPDPKB-B/III/2013 tentang *Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013*